

Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Helmi Dwi Agung Pambudi*, Nia Kurniasari

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*pambudihelmi69@gmail.com, nia.kurniasari@unisba.ac.id

Abstract. West Bandung Regency is an area located in the Bandung Metropolitan Area, on the other hand, West Bandung Regency is also a peripheral area which tends to have dependence on the center, namely Bandung City and Cimahi City. In the implementation of development, it is necessary to understand thoroughly in advance the meaning of development. Historically-ideologically, the idea of development is used as a Style of Governance to focus on the mechanism of economic productivity, resulting in efforts to narrow social space and minimize things that trigger social conflict. Therefore, the role of the state apparatus in the form of institutions is needed to ensure the creation of a mechanism that minimizes horizontal and ideological conflicts by prioritizing consensus and order. In terms of development politics determining sustainable development, in addition to the physical area, social development also needs to be the main focus for development in West Bandung Regency. In this study, the MICMAC and MACTOR analysis methods used input data from primary and secondary surveys. As for the approach method using case studies. The purpose of this study is to map the role of actors on development variables and determine the relationship between variables and the actors involved.

Keywords: *Politics, Development, Paradoxes, and Development Actors.*

Abstrak. Kabupaten Bandung Barat merupakan suatu wilayah yang berada di kawasan Bandung Metropolitan Area, disisi lain Kabupaten Bandung Barat juga merupakan wilayah periphery yang cenderung memiliki ketergantungan terhadap centre yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dipahami secara menyeluruh terlebih dahulu mengenai makna dari pembangunan. Secara Historis-Ideologis, ide pembangunan dijadikan sebagai Style of Governance untuk menitikberatkan pada mekanisme produktivitas ekonomi, sehingga timbul upaya penyempitan ruang sosial dan meminimalkan hal – hal memicu konflik sosial. Maka dari itu, dibutuhkan peran aparatur negara berbentuk kelembagaan untuk menjamin terciptanya mekanisme yang meminimalisir konflik horizontal dan ideology dengan mengutamakan konsesus dan ketertiban. Dalam hal politik pembangunan menentukan pembangunan yang berkelanjutan, selain fisik wilayahnya, pembangunan dari segi sosial kemasyarakatan juga perlu menjadi fokus utama bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metoda analisis MICMAC dan MACTOR yang menggunakan data masukan dari survey primer dan sekunder. Sedangkan untuk metoda pendekatannya menggunakan studi kasus. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memetakan peranan aktor terhadap variabel pembangunan dan mengetahui hubungan variabel dengan aktor yang terlibat.

Kata Kunci: *Politik, Pembangunan, Paradoks, dan Aktor Pembangunan.*

A. Pendahuluan

Pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya untuk merealisasikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun dalam upaya tersebut, seringkali terdapat suatu paradoks pembangunan seperti ketergantungan wilayah *periphery* terhadap wilayah *central*. Hal tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki ketergantungan terhadap wilayah Kota Bandung yang dimana kedua wilayah tersebut termasuk ke dalam *Bandung Metropolitan Area*.

Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat para aktor yang menjalankan aktivitas politik (saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan kinerja) dalam pembangunan. Secara lebih rinci, menurut Teori Maslow menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan terdapat tiga kelompok aktor yang saling mempengaruhi didalamnya yaitu Pemerintah selaku pemegang kebijakan, kemudian masyarakat yang dijadikan sebagai perspektif tujuan pembangunan, dan Swasta sebagai aktor penunjang dalam pembangunan. Apabila ketiga kelompok tersebut terlibat aktif dalam kegiatan politik pembangunan, maka pembangunan tersebut akan mencapai tujuan intinya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengkorelasikan kedua isu diatas, maka perlu adanya upaya identifikasi seberapa besar pengaruh kegiatan politik pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh antar variabel dalam pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kondisi interaksi kinerja para aktor yang terlibat dalam kegiatan politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat?”. Sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuannya yaitu: “Mengetahui kondisi pengaruh variabel pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat dan memetakan peranan aktor dalam kegiatan politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam memahami pengaruh politik pembangunan bagi kesejahteraannya dan dikemudian hari dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya.

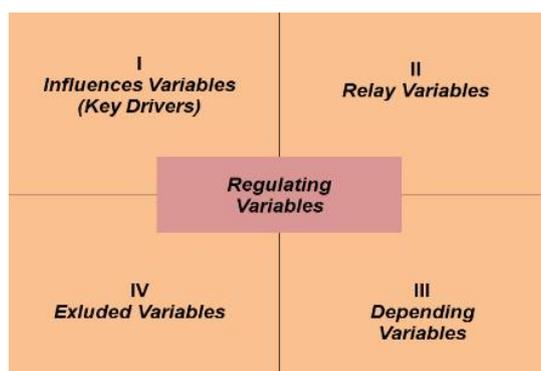
B. Metodologi Penelitian

Metoda pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metoda pendekatan normative dan studi kasus. Dengan kedua metoda tersebut, peneliti mengkaji beberapa produk hukum terkait pembangunan seperti Perda Kabupaten Bandung Barat. Pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dalam pembangunan dan menjadi acuan dilaksanakannya suatu pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, peneliti melakukan suatu penelitian yang dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori dengan kondisi di lapangan yang berbentuk informasi terkait isu pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Metoda pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer digunakan dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara bagi stakeholder atau aktor yang terlibat kegiatan politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah literatur dan peraturan yang terkait mengenai pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penelitian ini menggunakan dua metoda analisis yaitu metoda analisis *Micmac* dan *Mactor*. Metoda analisis *Micmac* digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel pembangunan yang sebelumnya variabel tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori ketergantungan (*dependence*) dan pengaruh (*influence*).

Pengelompokkan tersebut terbagi ke dalam empat kuadran yaitu *Influence Variables*, *Relay Variables*, *Depending Variables*, dan *Excluded Variables*. *Influence Variables* merupakan variabel yang sangat berpengaruh dengan sedikit ketergantungan, *Relay Variables* merupakan variabel yang sangat berpengaruh namun sangat ketergantungan, *Depending Variables* merupakan variabel yang memiliki sedikit pengaruh namun ketergantungannya tinggi, sedangkan *Excluded Variables* merupakan variabel yang tidak memiliki pengaruh dan ketergantungan terhadap variabel lainnya.



Gambar 1. Pemetaan Variabel Micmac

Sedangkan metoda analisis *Mactor* digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja dan hubungan antar aktor dalam kegiatan politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Pada metoda analisis ini dideskripsikan pada tiga input utama yang berbentuk matriks. Input data analisis *Mactor* dilakukan melalui matriks posisi yang berasal dari pendapat masing – masing aktor terhadap variabel pembangunan. Selain itu, input data analisis digunakan berdasarkan apresiasi kinerja aktor satu terhadap aktor lainnya untuk mengetahui hubungan antar aktor yang terlibat dalam politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Identifikasi Stakeholder yang Berperan dalam Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat

Peranan dan kepentingan para aktor selaku stakeholder tergantung pada tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Berikut ini merupakan tabel klasifikasi aktor selaku stakeholder yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Stakeholder Kunci, Primer, dan Tersier.

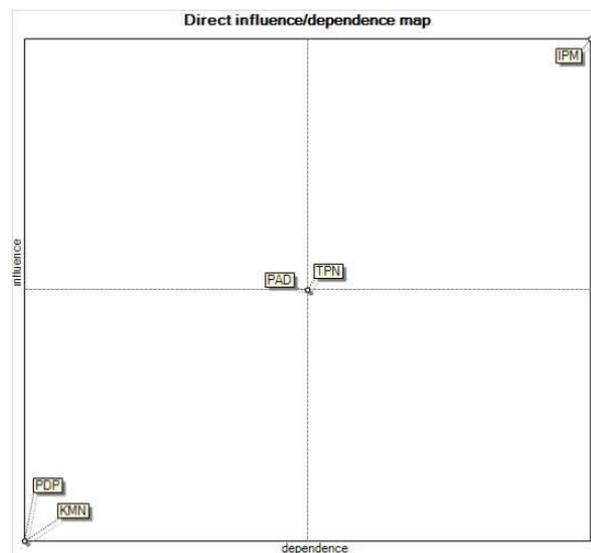
Tabel 1. Klasifikasi Stakeholder Politik Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

No	Stakeholder	Klasifikasi Stakeholder
1	Bupati Kabupaten Bandung Barat	Kunci
2	Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Barat	Kunci
3	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kunci
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat	Kunci
5	Dinas Sosial	Kunci
6	Organisasi Masyarakat	Tersier
7	Swasta	Tersier

8	Lembaga Swadaya Masyarakat	Tersier
9	Akademisi	Tersier
10	Tokoh Masyarakat	Primer

Keterkaitan Antar Variabel Pembangunan

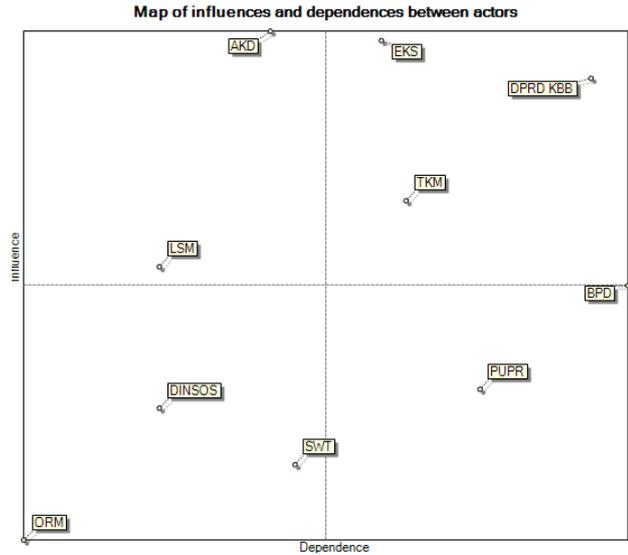
Berdasarkan hasil analisis *Micmac* menghasilkan suatu pemetaan variabel pada masing-masing kuadran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kuadran I yang merupakan *Influence Variables* tidak diisi oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang sangat berpengaruh dan sedikit ketergantungan pada variabel lainnya. Pada kuadran II yang merupakan *Relay Variables* diisi oleh Indeks Pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah yang berarti variabel tersebut berpengaruh namun sangat ketergantungan terhadap variabel lainnya. Kuadran III diisi yang merupakan *Depending Variables* tidak diisi oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang tingkat ketergantungannya tinggi namun pengaruhnya kecil terhadap variabel lainnya. Sedangkan pada kuadran IV yang merupakan *Excluded Variables* diisi oleh Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh dan ketergantungan yang kecil terhadap variabel lainnya.



Gambar 2. Peta Variabel menurut Pengaruh dan Ketergantungan

Pengaruh dan Hubungan Antar Politik Pembangunan

Keterlibatan para aktor dalam politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat terhadap Kesejahteraan Masyarakat didasarkan pada pengaruh kepentingan yang berbeda-beda. Pengaruh merupakan kemampuan aktor untuk mempengaruhi suatu proses dan memiliki kapasitas dalam mempengaruhi kemampuan aktor lainnya. Sedangkan kepentingan merupakan kepentingan para aktor terhadap terhadap sumberdaya atau keterkaitan untuk terlibat dalam suatu kegiatan.



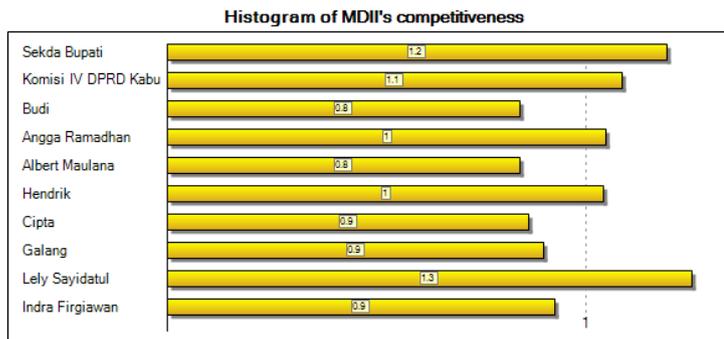
Gambar 3. Peta Pengaruh Kepentingan Aktor dalam Politik Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil analisis *Mactor* menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Bandung Barat memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam politik pembangunan sehingga memiliki daya saing yang sangat tinggi. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki pengaruh yang paling rendah dikarenakan selain hal teknis, aktor tersebut kurang terlibat secara langsung dalam agenda pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, aktor yang memiliki pengaruh rendah namun kepentingannya tinggi yaitu Bapelitbangda dan Dinas PUPR dikarenakan aktor tersebut tidak terlibat langsung secara tugas dan fungsi tanpa ketergantungan terhadap aktor lainnya, seperti Pemerintah Daerah selaku eksekutor pembangunan. Hal ini berbeda dengan stakeholder lain yang memiliki daya saing tinggi dan potensi risiko yang lebih rendah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa stakeholder terkait perlu mengacu terlebih dahulu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif maupun eksekutif. Dengan hasil ini, menunjukkan bahwa praktik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat masih menggunakan metode *Top Down*.

Daya Saing Aktor Politik Pembangunan

Pada matriks daya saing (MDII) ini akan memperlihatkan bahwa akademisi dan bupati (eksekutif) memiliki nilai tertinggi dengan asumsi sangat berpengaruh terhadap terciptanya kegiatan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Terlihat dari peranannya, akademisi dapat mengkaji beberapa permasalahan yang ada di wilayah terkait dan pihak eksekutif memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan yang seharusnya dapat menjadi acuan beberapa lembaga atau instansi.

Scala Competitiveness dengan *Objectivess* yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Perkapita (PPK), Kemiskinan (KMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pendapatn Asli Daerah (PAD), dan Ketimpangan Wilayah (KTW) mendapatkan respon yang positif dari sebagian besar aktor politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang menunjukkan bahwa sebagian aktor setuju terhadap tujuan tersebut. Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki respon positif dari semua aktor, hal tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan yang tidak kuat bagi aktor. Sedangkan keempat variabel lainnya memiliki hubungan yang kuat bagi aktor.



Gambar 4. Daya Saing Aktor Politik Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat

Pergeseran Pemetaan Aktor

Hasil dari pemetaan aktor terdapat beberapa aktor yang belum sesuai yaitu diantaranya DPRD Kabupaten Bandung Barat, Akademisi, dan Bapelitbangda. DPRD seharusnya bukan berada pada kuadran IV dikarenakan peranan legislatif dalam politik pembangunan merupakan aktor utama yang dapat mewakili masyarakat, selain Tokoh Masyarakat. Karena fungsi legislatif salah satunya yaitu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait pembanguna. Akademisi yang apabila ditinjau dalam peranannya untuk mengkaji suatu isu permasalahan pembangunan tidak semestinya berada pada Kuadran IV sebagai *spectator*. Alasan tersebut yang menguatkan bahwa seharusnya akademisi memiliki pengaruh yang tinggi dalam pembangunan. Sedangkan terkait Bapelitbangda, dalam penyusunan rencana pembangunan, dinas tersebut sudah jelas memiliki peranan yang penting, bukan sebatas pihak yang berada dalam lingkaran *spectator*.

Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukannya suatu pergeseran tingkat pengaruh. Pergeseran tingkat pengaruh DPRD dengan cara lebih melibatkan masyarakat untuk menyerap aspirasinya terhadap kemejukan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Terkait akademisi diperlukan wadah dalam mengkaji yang dimana hasilnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait pembangunan. Sedangkan terkait Bapelitbangda memerlukan upaya lebih mendalam soal koordinasi dengan Pemerintah. Hal – hal tersebut dapat dilakukan untuk menempatkan para aktor sebagaimana dengan fungsi dan peranannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kelompok hasil klasifikasi aktor politik pembangunan selaku stakeholder penelitian yaitu aktor kunci, primer, dan tersier. Aktor kunci yaitu Bupati (Sekda), DPRD Komisi IV, Bapelitbangda, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial. Aktor Tersier yaitu Organisasi Masyarakat, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Akademisi. Sedangkan Aktor Primer yaitu Tokoh Masyarakat.
2. Terdapat empat kuadran berdasarkan keterkaitan antar variabel diantaranya Kuadran I yang merupakan *Influence Variables* tidak diisi oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang sangat berpengaruh dan sedikit ketergantungan pada variabel lainnya. Pada kuadran II yang merupakan *Relay Variables* diisi oleh Indeks Pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah yang berarti variabel tersebut berpengaruh namun sangat ketergantungan terhadap variabel lainnya. Kuadran III diisi yang merupakan *Depending Variables* tidak diisi oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang tingkat ketergantungannya tinggi namun pengaruhnya kecil terhadap variabel lainnya. Sedangkan pada kuadran IV yang merupakan *Excluded Variables* diisi oleh Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh dan ketergantungan yang kecil terhadap variabel lainnya.
3. Berdasarkan hasil analisis hubungan dan pengaruh aktor politik pembangunan, DPRD Kabupaten Bandung Barat memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam politik pembangunan sehingga memiliki daya saing yang sangat tinggi. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki pengaruh yang paling rendah dikarenakan selain hal teknis, aktor tersebut kurang terlibat secara langsung dalam agenda pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Perkapita (PPK), Kemiskinan (KMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Ketimpangan Wilayah (KTW) mendapatkan respon yang positif dari sebagian besar aktor politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang menunjukkan bahwa sebagian aktor setuju terhadap tujuan tersebut. Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki respon positif dari semua aktor, hal tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan yang tidak kuat bagi aktor. Sedangkan keempat variabel lainnya memiliki hubungan yang kuat bagi aktor.
5. Secara keseluruhan, perlu dilakukannya suatu pergeseran tingkat pengaruh. Pergeseran tingkat pengaruh DPRD dengan cara lebih melibatkan masyarakat untuk menyerap aspirasinya terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Terkait akademisi diperlukan wadah dalam mengkaji yang dimana hasilnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait pembangunan. Sedangkan terkait Bapelitbangda memerlukan upaya lebih mendalam soal koordinasi dengan Pemerintah. Hal – hal tersebut dapat dilakukan untuk menempatkan para aktor sebagaimana dengan fungsi dan peranannya.

Acknowledge

Terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik putra sulungnya hingga sampai saat ini, pembimbing saya yaitu Ibu Nia Kurniasari S.T., M.T yang selalu menjadi rekan berdiskusi ilmiah ketika saya mengalami kendala dalam menyelesaikan penelitian, dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Daftar Pustaka

- [1] Anwar, Khairul. 2016. *Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Maredan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Eriestha, Devani. 2019. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandarlampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- [3] Ridha, Muhammad. 2016. *Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur dan Kepentingan Kapital*. Jakarta: Jurnal Politik Profetik.
- [4] Fauzi, Akhmad. 2019. *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Semiawan, Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- [6] Manaf, Azmah. 2013. *Perkembangan Politik dan Kesannya Ke Atas Pembangunan Ekonomi Terengganu Antara Tahun 1955 Hingga 1969*. Terengganu: Malaysian Journal of History, Politics, And Strategy.
- [7] Warijo. 2016. *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi)*. Jakarta : Kencana.